JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA

Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

PENGARUH ALOKASI DANA DESA, BELANJA DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Fadliyati[1], Sylvia Sjarlis[2], Haeranah[3]
[*1]Program Pascasarjan Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Makassar
[2]Program Pascasarjan Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Makassar
[3]Program Pascasarjan Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia Makassar
E-mail : [1]athikfadliyati81@gmail.com, [2]Sylvia.sjarlis2013@gmail.com, [3]rana090768@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan masyarakat secara parsial dan simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah 50 orang masyarakat di 3 (tiga) desa daratan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 36 orang.

Teknik analisis linear berganda menunjukkan hasil (1) Alokasi Dana Desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dengan hasil statistik t hitung sebesar 2,933 lebih besar dari t tabel sebesar 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05(2) Belanja desa (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dengan t hitung sebesar-2,681 lebih kecil dari ttabel 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,011 lebih besar dari 0,05 (3) Pemberdayaan Masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dengan t hitung sebesar 4,395 lebih besar dari t tabel 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (4) Sedangkan hasil uji statistik secara simultan Alokasidanadesa, Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dengan hasil statistik F hitung sebesar 17,967 lebih besar dari F tabel yaitu 2,90.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Pemberdayaan Masayarakt dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there is an influence on village fund allocation, village spending and community empowerment partially and simultaneously on improving community welfare.

The population of this study were 50 people in 3 (three) mainland villages, Takabonerate District, Selayar Islands Regency. Sampling using purposive sampling method with a sample size of 36 people. The multiple linear analysis technique shows the results (1) Village Fund Allocation (X1) has a positive and significant effect on improving community welfare(Y) with the statistical results of t count of 2.933 greater than t table of 2.034 and a significant level of 0.006 less than 0, 05 (2) Village expenditure (X2) has no positive and significant effect on improving community welfare (Y) with a t count of -2.681 smaller than t table 2.034 and a significant level of 0.011 greater than 0.05 (3) Community Empowerment (X3) has a positive and significant effect on improving communitywelfare (Y) withtcountof 4.395 greaterthanttable 2.034 andasignificant level of 0.000 less than 0.05 (4). and Community Empowerment has an effect on improving the welfare of the community (Y) with the results of the F-count statistic of 17.967 more The size of the F table is2.90.

Keywords : *Village Fund Allocation, Village Expenditures, Community Empowerment and improvement of Community Welfare*

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya. Peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan merupakan strategi pembangunan Indonesia saat ini. Pembangunan desa merupakan subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Hal demikian tentunya menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah setempat untuk melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Penyelenggaraan otonomi yang bertanggung jawab dimana harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Tumbel, 2017). Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa, harusnya selalu memerhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Menurut pasal 78 UU Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan memprioritaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadialan sosial. Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa perlu terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

Menurut Permen No. 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, Dana Desa tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal Dana Desa berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oelh Kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan mendapatan ekonomi keluarga dan Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Menurut Azwardi (2014) dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%), seperti menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa. Pendapat demikian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, dimana disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu suatu alokasi anggaran dari dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai minimal 10% untuk desa.

Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014).

Belanja desa dapat digunakan salah satunya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu tujuan penggunaan belanja desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, belanja desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa, meningkatkan BUMDes, melakukan pelatihan atau kegiatan yang dapat mendorong masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga masyarakat.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, sehingga tingkat kemiskinan akan menurun dan kesejahteraan masyarakatnya baik. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk yang berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat buruk (Sukmaraga, 2011).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan KepulauaInn Selayar		
	2016	2017	2018
1. Kesehatan	-	-	-
a. Angka Harapan Hidup	67.76	67.82	68.03
b. Indeks Kesehatan	73.48	73.57	73.89
Pendidikan	-	-	-
a. Angka Harapan Lama Sekolah	12.44	12.45	12.46
b. Rata-Rata Lama Sekolah	7.17	7.18	7.40
c. Indeks Pendidikan	58.46	58.52	59.28
Hidup Layak	-	-	-
a. Paritas Daya Beli	8123	8436	8666
b. Indeks Daya Beli	63.78	64.94	65.76

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Indeks Pembangunan Manusia yang ditakar dari beberapa aspek, yaitu (a) kesehatan yang terdiri dari, angka harapan hidup dan indeks kesehatan, (b) pendidikan, terdiri dari angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan, (c) Hidup layak, yaitu paritas daya beli dan indeks daya beli. Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, R.S., Irama, O.N (2018) terkait pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan (studi kasus di Provinsi Sumatera Utara) menunjukkan hasil bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan. Dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa merupakan salah satu

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Atas dasar ini, peneliti melakukan hal yang sama, yaitu menguji apakah alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan di kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kecamatan Takabonerate meruapakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk sebanyak 13.804 populasi. Dengan populasi yang besar tentunya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan tersebut. Mengoptimalkan penggunaan anggaran alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan adalah salah satu cara mencapai hal tersebut. Olehnya itu, hal ini menjadi perhatian lebih bagi peneliti untuk menelaah bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), belanja desa serta pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya dibuat dalam sebuah penelitian yang berjudul,"Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disusun suatu konsep kerangka pikir untuk mempermudah penganalisaan dalam pembahasan penelitian ini seperti berikut ini.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

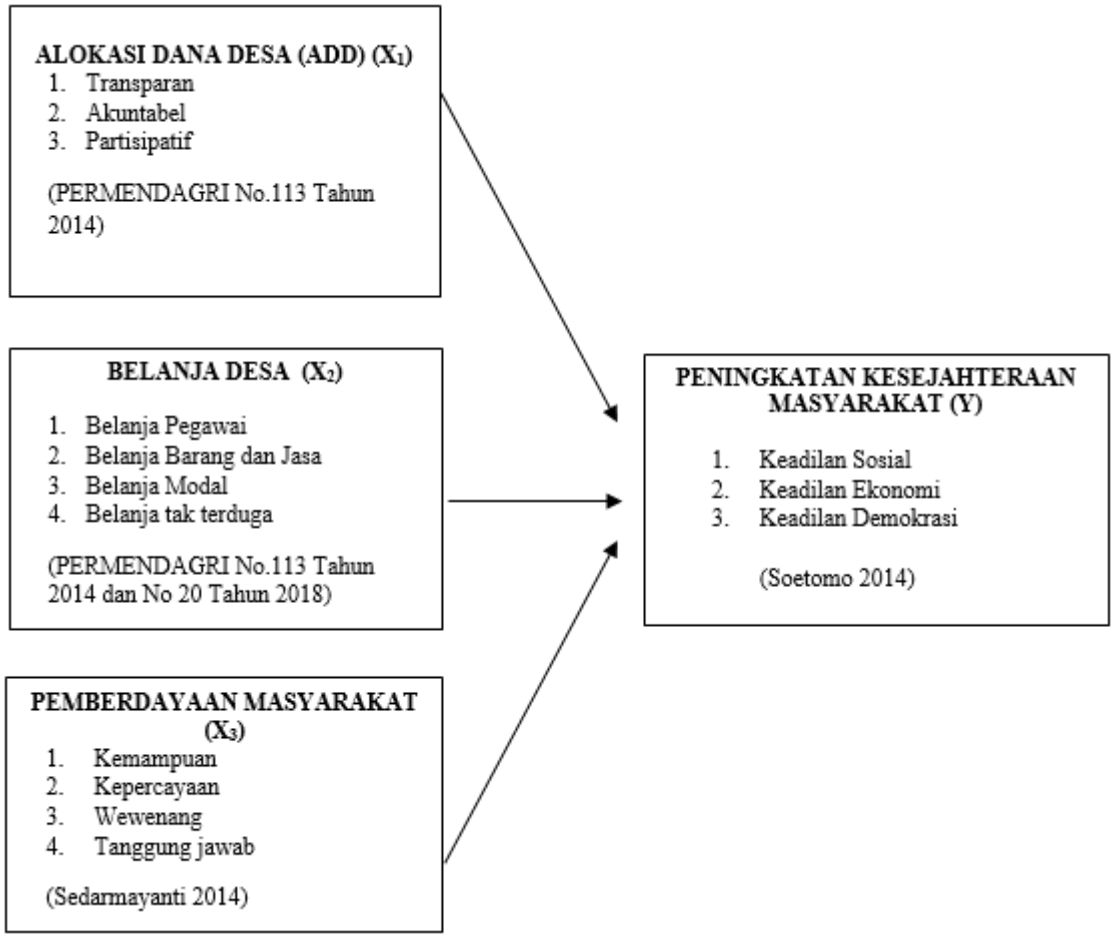

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Melalui gambar tersebut diatas, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga bahwa Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Diduga bahwa Belanja desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Diduga bahwa Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Diduga bahwa Alokasi dana desa, Belanja Desa dan Pemberdayaan berpengaruh simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dapat juga dilakukan sesuai dengan cakupan jenis eksplanasi atau jenis penjelasan ilmu yang akan dihasilkan oleh suatu penelitian. Sesuai dengan cakupan eksplanasinya penelitian dapat dibedakan atas penelitian kausalitas dan non kausalitas komparatif (Sugiyono, 2008: 12).

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan adanya hubungan sebab akibat antara situasi yang digambarkan dalam variabel, dan atas dasar itu ditariklah sebuah kesimpulan umum (Sugiyono, 2008: 12). Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Lubis, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang di 3 (tiga) desa daratan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampel yang digunakan sebanyak 36 orang. Mengukur variabel Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan judgement atau kuota tertentu (Erlina, 2011). Kriteria yang digunakan adalah Aparat desa, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat di tiga desa daratan kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan output satatistik **d**alam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program computer IBM SPSS for Windowsversi 23. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Tabel 2. Hasil Output Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.021	5.563		.184	.855					
	ADD	.417	.142	.416	2.933	.006	.635	.460	.316	.580	1.724
	BD	-.328	.122	-.456	-2.681	.011	.378	-.428	-.289	.402	2.486
	PMD	.683	.156	.777	4.395	.000	.690	.613	.474	.372	2.685

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dan hasil tersebut dalam bentuk persamaan regersi sebagai berikut

$$Y = 1.021 + 0,417 + - 0,328 + 0,583 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas, maka dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1.021 menunjukkan hubungan positif artinya kombinasi varaibel Alokasi Dana Desa, Belanja Desa dan Pemberdayaan Masyarakat jika ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 1.021 kali atau sebesar 4,71 %.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,417 menunjukkan bahwa setiap peningkatkan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,417 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar - 0,328 menunjukkan angka negative yang artinya bahwa setiap penurunan 1 satuan Belanja Desa akan menurunkan kinerja pegawai sebesar - 0,328 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,583 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan Pemberdayaan Masyarakat akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,583 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil uji Multikolinearitas yang terdapat pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel independen penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas karen semua variabel, baik variabel independen yang dihitung dengan uji selisih nilai mutlak menunjukkan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan mempunyai niali VIF yang tidak lebih dari 10.

Uji Parsial (Uji t)

Pada uji t ini, jika t hitung lebih besar daripada t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). jika nilai sig<0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai Sig> 0.05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

dengan k = jumlah variabel (bebas+terikat) dan n = jumlah sampel pembentuk regresi. Jadi, df=36-4=32. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,034.

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1.021	5.563		.184	.855			
	ADD	.417	.142	.416	2.933	.006	.635	.460	.316
	BD	-.328	.122	-.456	-2.681	.011	.378	-.428	-.289
	PMD	.683	.156	.777	4.395	.000	.690	.613	.474

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Berdasarkan tabel 3 pada hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa alokasi dana desa (X1) secara statistik berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan kesejahteraan (Y). Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan bahwa alokasi dana desa (X1) memilki t hitung sebesar 2,933 lebih besar dari t tabel sebesar 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Alokasi dana desa (X1) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,417 berarti alokasi dana desa (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). Koefesien regresi yang bernilai positif ini berarti peningkatan Alokasi dana desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini bahwa alokasi dana desa (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). Koefisien memiliki hubungan positif artinya peningkatan alokasi dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini artinya hipotesisis 1 diterima.

Hasil statistik menunjukkan bahwa belanja desa (X2) memiliki t hitung sebesar -2,681 lebih besar dari t tabel 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. belanja desa (X2) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,328. Berarti belanja desa (X2) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). koefisien memiliki pengaruh negatif artinya peningkatan belanja desa mengurangi kesejahteraan masyarakat.Ini artinya hipotesis 2 ditolak. karena arahnya negatif padahal yang di harapkan positif.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki t hitung sebesar 4,395 lebih besar dari t tabel 2,034 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,683 ini berarti pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). nilai koefisien memiliki pengaruh positif artinya Jika pemberdayaan masyarakat di tingkatkan maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Ini berarti hipotesis ketiga diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	403.402	3	134.467	17.967	.000[b]
	Residual	239.487	32	7.484		
	Total	642.889	35			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan
b. Predictors: (Constant), PMD, ADD, BD

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Dari uji anova atau uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,967 nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 2,90 atau 17,967 >2,90 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh alokasi dana desa atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dari ke tiga variabel bebas yakni variabel alokasi dana desa (X1), belanja desa (X2) dan Pemberdayaan masyarakat (X3) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). ini bearti bahwa hipotesis 4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.792[a]	.627	.593	2.73568	1.134

a. Predictors: (Constant), PMD, ADD, BD

b. Dependent Variable: Kesejahteraan

Koefisien regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dari tabel 5.17 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,627 hal ini berarti bahwa 62,7% yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan. Sisanya sebesar 27,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada penelitian ini Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar. Semakin meningkat alokasi dana desa maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar.

Fakta ini menunjukkan bahwa aparat desa di kecamatan takabonerate telah menjalankan tugasnya dengan baik dimana aparat desa telah menginformasikan mengenai latar belakang dan sasaran dari alokasi dana desa kepada masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa. Masyarakat desa juga merasa sudah dilibatkan oleh pemerintah desa karena telah ikut berpartisipasi di dalam melakukan musyawarah rencana penggunaan alokasi dana desa dan dapat mengusulkan rencana penggunaan alokasi dana desa.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erni Tahir (2018) yang menunjukkan bahwa Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut tabel anggaran alokasi dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Tabel 6. Alokasi Dana Desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

No	Tahun	Desa		
		Batang	Nyiur Indah	Kayuadi
1.	2018	762.004.855,00	772.925.145,00	
2.	2019	853.684.354,00	858.386.609,00	890.625.222,00
3.	2020	786.955.237,00	783.325.143,00	808.992.742,00

Sumber data : APBDES desa batang, Nyiur Indah dan Kayuadi

Belanja desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada penelitian ini Belanja desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar. Ini berarti bahwa Belanja desa berpengaruh tetapi tidak memiliki efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dikecamatan takabonerate belum memprioritaskan penggunaan dana desa pada belanja perbaikan instalasi listrik desa, perbaikan instalasi listrik dan sanitasi desa. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, R.S (2018) menunjukkan hasil bahwa alokasi dana desa memiliki efek langsung pada kemiskinan, tapi alokasi dana desa tidak memiliki efek langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini penulis menggunakan metodo kuantitatif.

Dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 7. Belanja Desa tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2018	
		Batang	Nyiur Indah
1.	Belanja Pegawai	180.600.00,00	187.200.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	903.793.867,77	977.624.530,08
3.	Belanja Modal	719.609.767,23	894.600.600,14
4.	Belanja Tidak terduga	0,00	0,00

Sumber data : APBDES desa batang, Nyiur Indah Kec. Takabonerat

Tabel 8. Belanja Desa tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Batang	Nyiur Indah	Kayuadi
1.	Belanja Pegawai	232.800.000,00	166.800.000,00	190.800.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.167.134.071,24	1.067.127.148,50	1.137.741.327,61
3.	Belanja Modal	745.673.800,00	1.069.663.886,47	839.420.561,08
4.	Belanja Tidak terduga	2.501.854,00	0,00	13.433.500,00

Sumber data : APBDES desa batang, Nyiur Indah dan Kayuadi Kec. Takabonerate

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Tabel 9. Belanja Desa Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020		
		Batang	Nyiur Indah	Kayuadi
1.	Belanja Pegawai	399.990.600,00	332.152.000,00	371.550.600,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	574.176.498,00	655.512.016,60	661.704.352,33
3.	Belanja Modal	721.807.200,00	726.051.431,40	828.169.280,00
4.	Belanja Tidak terduga	364.917.793,00	415.400.000,03	296.411.920,00

Sumber data : APBDES desa batang, Nyiur Indah dan Kayuadi Kec. Takabonerate

Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada penelitian ini Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar. Semakin meningkat Pemberdayaan maka kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar juga dapat meningkat.

Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kepercayaan masyarakat aparat desa di kecamatan takabonerate telah menjalankan tugasnya dengan baik dimana aparat desa telah menginformasikan mengenai latar belakang dan sasaran dari alokasi dana desa kepada masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa. Masyarakat desa juga merasa sudah dilibatkan oleh pemerintah desa karena telah ikut berpartisipasi di dalam melakukan musyawarah rencana penggunaan alokasi dana desa dan dapat mengusulkan rencana penggunaan alokasi dana desa.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Parida, J., Setiamandani, E.D. (2019), dengan judul "Pengaruh strategi pembangunan Masyarakat terhadap peningkatan Kesejahteraan Desa". Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif secara signifikan strategi pemberdayaan masyarakat dengan kesejahteraan desa.

Alokasi dana desa, Belanja Desa dan Pemberdayaan berpengaruh simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada penelitian ini alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan berpengaruh simultan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar. alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan takabonerate. Semakin meningkat alokasi dana desa, belanja desa dan pemberdayaan maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah memberikan Keadilan sosial kepada masyarakat desa berupa fasilitas pendidikan dimana semakin banyak masyarakt desa yang dapat menempuh pendidikan dasar dan menengah serta fasilitas kesehatan dimana masyarakat desa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Alokasi dana desa juga telah memberikan keadilan Ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat akibat dari program pemberdayaan masyarakat desa dan keadilan demokrasi dimana program alokasi dana desa telah menghidupkan

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

musyawarah untuk mufakat dalam program alokasi dana desa pada masyarakat kecamatan takabonerate kabupaten kepulauan selayar.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dinyatakan oleh Todaro dan stephen C. Smith (2006) bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pemnbangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi : Pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusian; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin tinggi alokasi dana desa maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah desa di kecamatan Takabonerate belum memprioritaskan penggunaan dana desa pada belanja perbaikan instalasi listrik desa dan sanitasi desa
3. Aparat desa telah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui pengunaan alokasi dana desa.
4. Alokasi dana desa telah memberikan keadialan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi di kecamatan Takabonerate Kabuapten Kepulauan Selayar.

DAFTAR PUSTAKA

Amran, Chalid, Simarmata. (2016). Alokasi Dana DesaTerhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Skrips.

Anwas, Oos, M . (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung. Alfabeta.

Asni, Fauzi, Maryunani., dan Sasongko. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 23197668. Volume 10, Issue 4 (May.-Jun. 2013.

Badrudin, Rudy. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.

Chatarina, Rusmiyati. (2011). Pemberdayaan Remaja untuk Sekolah. Yogyakarta. B2P3KS.

Dewi, R.S. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi.

Erlina. (2011). Metode Peneltian. USU Press. Medan.

Erni, Tahir. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadao Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Bonongko Kabupaten Wakatobi. Skripsi.

JURNAL PELOPOR MANAJEMEN INDONESIA
Volume 2 Nomor 2
Hal. 198-211
e-ISSN : xxxx-xxxx & p-ISSN : xxxx-xxxx
Homepage : https://nobel.ac.id/index.php/jpmi

Fahrudin, Adi. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. Refika Aditama.

Hikmat, R. Harry. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi. Bandung. Humaniora Utama Press.

Hoesada, J. (2014). Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Jakarta.

Mundir. (2016). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Perberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai. Skripsi.

Pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restrebusi Daerah"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Mentri Desa No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan diberi nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan atau evaluasi dana desa pada tangal 4 Mei 2014

Prijono, S. Onny., dan A.M.W. Pranarka (penyunting). (1996). Pemberdayaan Konsep. Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center For Strategic and International Studies (CSIC).

Sedarmayanti. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. Refika Aditama.

Soekanto. (2010). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Soetomo. (2014). Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suhairi. (2016). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. Jurnal Skripsi.